
**PENGARUH KUALITAS PELAPORAN DAN PENGELOLAAN KEUANGAN
TERHADAP AKUNTABILITAS PUBLIK PADA BLUD RUMAH SAKIT UMUM
DAERAH dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO KABUPATEN BULUNGAN
KALIMANTAN UTARA**

***THE INFLUENCE OF FINANCIAL REPORTING QUALITY AND FINANCIAL
MANAGEMENT ON PUBLIC ACCOUNTABILITY AT BLUD REGIONAL GENERAL
HOSPITAL dr. H. SOEMARNO SOSROATMODJO, BULUNGAN REGENCY, NORTH
KALIMANTAN***

^{1✉}Norlin Whang

Program Magister Manajemen, Universitas Fajar, Makassar

norlin.whang@gmail.com

²Mujahid

Universitas Fajar, Makassar

mujahid@unifa.ac.id

³Abdul Samad A

Universitas Fajar, Makassar

abdulsamad@unifa.ac.id

Abstract

This study aims to examine and analyze the influence of Financial Reporting Quality and Financial Management, both partially and simultaneously, on Public Accountability at the Regional Public Service Agency (BLUD) of dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Regional General Hospital, Bulungan Regency, North Kalimantan. This type of research is associative quantitative. The population in this study consisted of 100 employees involved in the financial management of BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, with a purposive sampling technique resulting in 80 respondents based on the Slovin formula calculation. Data collection was conducted through the distribution of questionnaires that had been tested for validity and reliability. The data analysis methods used were Multiple Linear Regression Analysis, t-test, F-test, and Coefficient of Determination with the assistance of SPSS. The results showed that Financial Reporting Quality partially has a positive and significant effect on Public Accountability; Financial Management partially has a positive and significant effect on Public Accountability; and Financial Reporting Quality and Financial Management simultaneously have a positive and significant effect on Public Accountability.

Keywords : Financial Reporting Quality, Financial Management, Public Accountability.

Abstrak

Penelitian ini bertujuan untuk menguji dan menganalisis pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan baik secara parsial maupun simultan terhadap Akuntabilitas Publik pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan Kalimantan Utara. Jenis penelitian ini adalah kuantitatif asosiatif. Populasi dalam penelitian ini adalah pegawai yang terlibat dalam pengelolaan keuangan BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo sebanyak 100 orang, dengan teknik pengambilan sampel purposive sampling yang menghasilkan 80 orang responden berdasarkan perhitungan rumus Slovin. Teknik pengumpulan data dilakukan melalui penyebaran kuesioner yang telah diuji validitas dan reliabilitasnya. Metode analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Berganda, Uji t, Uji F, serta Koefisien Determinasi dengan bantuan SPSS. Hasil penelitian menunjukkan bahwa Kualitas Pelaporan Keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik; Pengelolaan Keuangan secara parsial berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik; Kualitas Pelaporan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik.

Kata Kunci : Kualitas Pelaporan Keuangan, Pengelolaan Keuangan, Akuntabilitas Publik.

PENDAHULUAN

Dalam pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD), transparansi dan akuntabilitas merupakan komponen krusial dalam menciptakan tata kelola keuangan yang efektif dan berintegritas. Menurut Florini (2020), transparansi adalah ketersediaan informasi yang relevan dan mudah diakses publik sebagai dasar partisipasi dalam proses pengambilan keputusan. Transparansi tidak hanya mendorong keterbukaan, tetapi juga memfasilitasi pengawasan publik terhadap pengelolaan dana layanan kesehatan.

Bovens (2021) menyatakan bahwa akuntabilitas adalah kewajiban lembaga publik untuk menjelaskan serta mempertanggungjawabkan tindakan dan kebijakan mereka kepada pihak yang memiliki otoritas atau kepada publik luas. Dalam sistem BLUD, di mana fleksibilitas keuangan diberikan untuk meningkatkan efisiensi pelayanan, penerapan transparansi dan akuntabilitas yang optimal dapat memperkuat kepercayaan masyarakat serta memastikan penggunaan anggaran yang tepat sasaran dan berdaya guna. Studi ini bertujuan mengkaji bagaimana kedua konsep tersebut dapat diintegrasikan secara strategis dalam pelaporan dan pengelolaan keuangan RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.

Urgensi penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD, khususnya di RSUD di dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, semakin meningkat seiring dengan tuntutan publik terhadap tata kelola keuangan yang bersih, efisien, dan berorientasi pada pelayanan. Di dunia nyata, lemahnya transparansi dan akuntabilitas berpotensi menimbulkan penyimpangan anggaran, rendahnya efektivitas layanan kesehatan, serta menurunnya kepercayaan masyarakat terhadap institusi pelayanan publik. Kedua konsep tersebut bukan hanya ideal secara normatif, tetapi menjadi fondasi penting dalam membangun sistem yang mampu menjawab tuntutan efisiensi dan integritas. Dalam perspektif akademik, studi mengenai transparansi dan akuntabilitas juga terus berkembang sebagai bagian dari reformasi birokrasi dan inovasi sektor publik. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi empiris terhadap penguatan manajemen keuangan di RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo berbasis prinsip *good governance*, sekaligus menjadi acuan kebijakan untuk meningkatkan mutu pelayanan kesehatan yang berkelanjutan dan bertanggung jawab.

Fenomena empiris menunjukkan bahwa penerapan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan di RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo masih menghadapi berbagai tantangan. Berdasarkan hasil studi pada RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh, ditemukan bahwa meskipun status BLUD memberikan fleksibilitas dalam pengelolaan keuangan, masih terdapat kendala dalam kepatuhan pelaporan dan efektivitas sistem akuntansi. *Return on Asset* (ROA) selama periode 2013–2022 menunjukkan rata-rata 46,4%, yang secara teknis tergolong baik, namun belum sepenuhnya mencerminkan efisiensi penggunaan aset secara optimal. Tabel 1. Return on Asset (ROA) RSUD dr. Zainoel Abidin Banda Aceh Tahun 2013–

2022

No	Tahun	<i>Return on Asset</i> (ROA) (%)
1	2013	43,1
2	2014	45,6
3	2015	47,8
4	2016	44,3

5	2017	48,9
6	2018	49,5
7	2019	46,7
8	2020	45,2
9	2021	46,0
10	2022	47,3
Rata-rata	2013–2022	46,4

Sumber: Artikel Zulfahmi et al, 2025

Di sisi lain, studi kasus pada RSUD Permata dan RSUD Berlian mengungkapkan bahwa keterbatasan sumber daya manusia yang memahami prinsip BLUD serta perbedaan basis pelaporan (akrual vs kas) menjadi hambatan utama dalam menyajikan informasi keuangan yang komprehensif. Laporan keuangan RSUD Kalisat selama masa pandemi Covid-19 tidak sepenuhnya dapat diakses publik, menunjukkan lemahnya transparansi informasi kepada masyarakat. Fakta-fakta ini memperkuat urgensi untuk mengoptimalkan sistem pelaporan, meningkatkan kapasitas SDM, dan memperkuat komitmen manajemen dalam mewujudkan tata kelola keuangan yang akuntabel dan transparan di lingkungan BLUD RSUD.

Beberapa penelitian sebelumnya telah menunjukkan bahwa pendekatan New Public Management dan Agency Theory menawarkan solusi strategis terhadap tantangan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD di RSUD. Teori New Public Management mendorong efisiensi, efektivitas, serta akuntabilitas melalui desentralisasi dan orientasi pada kinerja dalam pengelolaan sektor publik (Osborne & Gaebler, 1992; Hood, 1991). Agency Theory menjelaskan pentingnya mekanisme kontrol dan pelaporan guna mengurangi asimetri informasi antara pengelola RSUD (agen) dan pemerintah/publik (prinsipal) (Jensen & Meckling, 1976). Berdasarkan pendekatan tersebut, terdapat tiga variabel independen yang diyakini dapat memperbaiki kondisi transparansi dan akuntabilitas, yaitu: kapasitas sumber daya manusia (SDM), sistem informasi akuntansi, dan komitmen manajemen. Ketiganya dapat digunakan dalam model moderasi, yang bertujuan menganalisis seberapa besar pengaruh mereka dalam memperkuat hubungan antara pengelolaan keuangan BLUD dan outcome transparansi-akuntabilitas.

Rahmiati & Baihaqi (2025) menambahkan bahwa tenaga akuntansi bersertifikasi di RSUD cenderung menghasilkan laporan keuangan lebih transparan. Penelitian oleh Diana et al. (2023) menekankan pentingnya pemahaman terhadap regulasi BLUD dalam menciptakan akuntabilitas yang berkelanjutan. Zulfahmi et al. (2025) menyebutkan bahwa dukungan manajemen terhadap pelaporan berbasis kinerja turut mendorong efisiensi aset RSUD. Novyandina et al (2025) mengungkapkan bahwa komitmen manajemen dalam menyusun RBA berbasis hasil mampu meningkatkan transparansi dan efektivitas anggaran. Temuan-temuan ini memperkuat bahwa ketiga variabel tersebut berperan signifikan dalam mengoptimalkan tata kelola keuangan BLUD secara transparan dan akuntabel.

Sebagian besar penelitian menunjukkan bahwa kapasitas SDM, sistem informasi akuntansi, dan komitmen manajemen berpengaruh positif terhadap transparansi dan akuntabilitas pengelolaan keuangan BLUD di RSUD, beberapa studi menunjukkan hasil yang bertentangan. Penelitian oleh Rianti (2021) menemukan bahwa penerapan sistem BLUD tidak memberikan peningkatan

signifikan terhadap transparansi pelaporan keuangan di RSUD Kabupaten Klungkung, disebabkan oleh lemahnya implementasi teknis dan kurangnya pemahaman manajemen. Studi Ramadhani dan Sulistyowati (2022) menunjukkan bahwa sistem informasi akuntansi yang digunakan di beberapa Puskesmas BLUD belum mampu menyajikan laporan keuangan secara akurat dan terbuka, sehingga tidak berpengaruh signifikan terhadap akuntabilitas publik. Penelitian oleh Syahputera dan Padriansyah (2023) mengungkapkan bahwa ketidakkonsistenan penerapan standar akuntansi di RSUD menyebabkan struktur pelaporan yang tidak seragam, yang berdampak negatif terhadap transparansi. Temuan-temuan ini menunjukkan adanya variasi hasil dan kesenjangan penelitian yang perlu ditelusuri lebih lanjut untuk memahami faktor-faktor yang memoderasi efektivitas variabel independen dalam meningkatkan transparansi dan akuntabilitas.

Penerapan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (PPK-BLUD) pada dasarnya dirancang untuk memberikan fleksibilitas anggaran demi meningkatkan efisiensi operasional. Hal ini sejalan dengan temuan Yuhendrizal, Syaodih, & Rinawati (2025) yang menyatakan bahwa kebebasan menggunakan pendapatan fungsional secara langsung mampu mendongkrak efisiensi harian rumah sakit. Namun, fleksibilitas ini sering kali terjebak dalam mispersepsi internal, di mana divisi klinis non-keuangan menganggap BLUD hanyalah urusan bagian keuangan semata, sehingga menurunkan partisipasi kolektif mereka. Masalah koordinasi ini diperparah oleh adanya research gap berupa tiadanya model integrasi fungsional yang menghubungkan fleksibilitas anggaran dengan akuntabilitas laporan kinerja klinis.

Di sisi lain, dari perspektif kinerja keuangan, Zulfahmi, Yuliaty, & Nurhaida (2025) membuktikan bahwa status BLUD berdampak positif signifikan terhadap peningkatan profitabilitas internal (seperti Return on Assets / ROA). Sayangnya, peningkatan ini tidak otomatis meningkatkan kepatuhan aspek akuntansi atau sistem pelaporan keuangan secara signifikan. Terdapat kesenjangan eksplanatori dalam riset tersebut, karena belum diuji bagaimana lonjakan profitabilitas internal tersebut ditransmisikan secara nyata menjadi akuntabilitas publik eksternal, seperti peningkatan kualitas layanan dan kepuasan pasien.

Pentingnya akuntabilitas publik ini juga ditegaskan oleh Ramadhan (2025), yang menemukan bahwa akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif terhadap kinerja anggaran melalui efektivitas anggaran sebagai variabel mediasi. Meskipun begitu, penelitian Ramadhan memiliki kesenjangan metodologis karena hanya mengandalkan persepsi subjektif kuesioner dari 38 pegawai internal, tanpa memverifikasinya dengan data objektif seperti temuan riil audit Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Terkait dengan transparansi, Kamela, et al. (2024) menunjukkan bahwa publikasi laporan keuangan secara terbuka di situs resmi dapat meningkatkan kepercayaan dan kepuasan masyarakat (IKM mencapai 86,98). Namun, riset tersebut hanya berfokus pada dampak hilir (publikasi digital), sehingga menyisakan kesenjangan karena melewatkan faktor hulu akuntansi seperti keandalan Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS), kompetensi SDM, serta proses rekonsiliasi kas dan piutang sebelum laporan dipublikasikan. Padahal, faktor hulu berupa pengendalian internal sangat krusial. Sebagaimana dinyatakan oleh Firmansyah (2024), kelemahan pengendalian internal pada manajemen piutang,

persediaan, dan lemahnya audit internal berdampak negatif fatal terhadap efisiensi operasional dan mereduksi akuntabilitas publik. Hanya saja, penelitian Firmansyah masih bersifat umum (scoping review) pada BLU tingkat pusat, sehingga terdapat kesenjangan kontekstual jika diterapkan pada BLUD RSUD yang menghadapi tekanan regulasi ganda (dual compliance) antara Permendagri dan Permenkes.

Lokus penelitian ini ditetapkan pada RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo yang berlokasi di Tanjung Selor, Kabupaten Bulungan, Kalimantan Utara. Rumah sakit ini telah berstatus sebagai Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) dan menjadi pusat pelayanan kesehatan rujukan tingkat lanjutan di wilayah perbatasan Indonesia. Pemilihan RSUD ini sebagai lokasi penelitian didasarkan pada beberapa pertimbangan strategis dan empiris. Pertama, berdasarkan Peraturan Bupati Bulungan Nomor 37 Tahun 2024, RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo telah memiliki pedoman tata kelola BLUD yang komprehensif, termasuk pengaturan pelaporan, penganggaran, dan pertanggungjawaban keuangan. Kedua, hasil studi sebelumnya menunjukkan bahwa meskipun rumah sakit ini telah menerapkan sistem BLUD, masih terdapat tantangan dalam hal efektivitas sistem pengaduan publik, kualitas pelaporan keuangan, dan keterbukaan informasi kepada masyarakat. Ketiga, RSUD ini memiliki karakteristik unik sebagai rumah sakit daerah yang melayani masyarakat di wilayah perbatasan dengan tingkat kebutuhan kesehatan yang tinggi, namun menghadapi keterbatasan sumber daya dan kompleksitas birokrasi.

RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo menjadi lokus yang relevan dan representatif untuk mengkaji optimalisasi transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan BLUD, serta mengembangkan model penelitian yang dapat diterapkan pada rumah sakit daerah lainnya di Indonesia. Berdasarkan uraian sebelumnya, penelitian ini secara khusus difokuskan untuk menganalisis hubungan antara Kualitas Pelaporan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik pada BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo.

TINJAUAN PUSTAKA

Kualitas Pelaporan Keuangan

Kualitas pelaporan keuangan merupakan tingkat keandalan dan kegunaan informasi keuangan yang disajikan dalam laporan keuangan sehingga dapat digunakan oleh para pemangku kepentingan untuk menilai kinerja, posisi keuangan, serta akuntabilitas suatu organisasi. Laporan keuangan yang berkualitas harus mampu memberikan informasi yang relevan, akurat, dan dapat dipercaya sehingga dapat dijadikan dasar dalam pengambilan keputusan oleh pihak internal maupun eksternal organisasi. Menurut *International Accounting Standards Board* (2020), kualitas pelaporan keuangan ditentukan oleh karakteristik kualitatif informasi keuangan yang meliputi relevansi (*relevance*), representasi yang tepat atau keandalan (*faithful representation*), dapat dibandingkan (*comparability*), dapat dipahami (*understandability*), serta ketepatan waktu (*timeliness*). Karakteristik tersebut bertujuan agar informasi yang disajikan dalam laporan keuangan memiliki nilai guna bagi para pengguna dalam menilai kondisi dan kinerja organisasi.

Pengelolaan Keuangan

Pengelolaan keuangan (*financial management*) merupakan salah satu pilar krusial baik dalam organisasi sektor publik maupun sektor privat. Dalam konteks Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD),

teori pengelolaan keuangan sering kali mengintegrasikan konsep tata kelola sektor publik dengan praktik bisnis yang sehat guna mengoptimalkan pelayanan publik tanpa mengutamakan pencarian keuntungan (*non-profit*). Indikator Siklus Pengelolaan Keuangan (Permendagri No. 77 Tahun 2020) yaitu perencanaan dan penganggaran, pelaksanaan, penatausahaan, pelaporan dan pertanggungjawaban, dan pengawasan.

Akuntabilitas Publik

Akuntabilitas publik merupakan salah satu pilar utama dalam perwujudan tata kelola pemerintahan yang baik (*good governance*), khususnya pada instansi yang telah menerapkan pola Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) seperti Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD). Mardiasmo (2021) mendefinisikan akuntabilitas publik sebagai kewajiban pihak pemegang amanah (agen) untuk memberikan pertanggungjawaban, menyajikan, melaporkan, dan mengungkapkan segala aktivitas dan kegiatan yang menjadi tanggung jawabnya kepada pihak pemberi amanah (prinsipal) yang memiliki hak dan wewenang untuk meminta pertanggungjawaban tersebut. Untuk mengukur akuntabilitas publik secara komprehensif, konsep ini dipecah menjadi beberapa dimensi krusial. Merujuk pada perkembangan teori akuntansi sektor publik modern, akuntabilitas publik tidak dapat berdiri sendiri melainkan dibentuk oleh dua dimensi utama, yaitu transparansi (keterbukaan) dan akuntabilitas (pertanggungjawaban) itu sendiri (Siregar & Ramadhan, 2022).

Transparansi dan Akuntabilitas Pengelolaan Keuangan

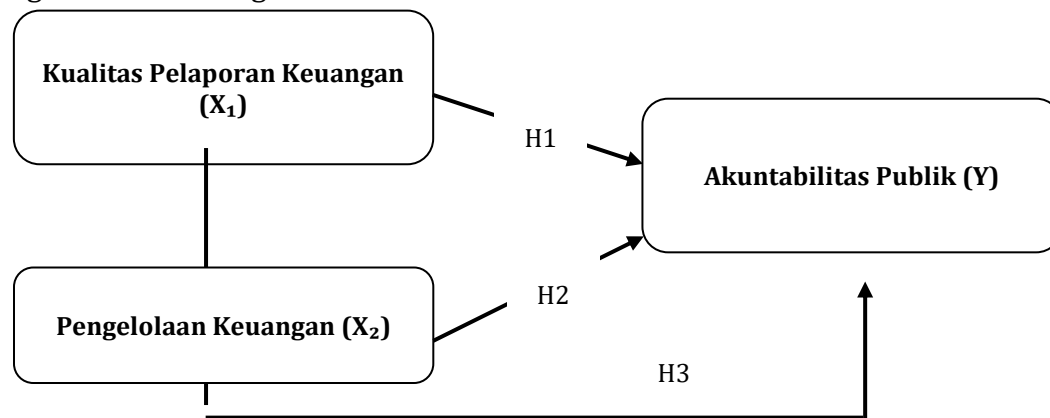
Transparansi merupakan salah satu prinsip dasar keterbukaan yang wajib diimplementasikan oleh setiap organisasi, baik sektor publik maupun sektor swasta, guna membangun kepercayaan konstituen dan pemangku kepentingan (*stakeholders*). Sedarmayanti (2021) menyatakan bahwa transparansi adalah prinsip yang menjamin akses atau kebebasan bagi semua orang untuk memperoleh informasi tentang penyelenggaraan organisasi, yakni informasi tentang kebijakan, proses pembuatan dan pelaksanaannya, serta hasil-hasil yang dicapai. Informasi yang disediakan harus akurat, jujur, dan dapat diakses secara mudah oleh pihak-pihak yang berkepentingan. Untuk mengukur sejauh mana prinsip transparansi telah diterapkan dalam suatu sistem tata kelola, terdapat beberapa dimensi utama yang harus dipenuhi. Pasolong (2023) menguraikan tiga dimensi krusial dari keterbukaan informasi publik, yaitu informasi yang mudah diakses (*accessibility*), kejelasan dan kelengkapan informasi (*informativeness*), ketepatan waktu (*timeliness*).

Secara etimologis, akuntabilitas berakar dari konsep pertanggungjawaban keuangan yang kemudian berkembang menjadi instrumen evaluasi kinerja organisasi secara menyeluruh. Mardiasmo (2021) menegaskan bahwa akuntabilitas adalah bentuk kewajiban mempertanggungjawabkan keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan sebelumnya, melalui media pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik. Dalam perspektif teori administrasi modern, akuntabilitas menuntut adanya kejelasan mengenai siapa yang bertanggung jawab (*who is accountable*) dan kepada siapa pertanggungjawaban tersebut harus disampaikan (*to whom is accountability owed*). Bovens (2021) mendefinisikan akuntabilitas sebagai sebuah hubungan sosial di mana seorang aktor merasa memiliki kewajiban

untuk menjelaskan dan menjustifikasi perilakunya kepada forum atau pihak lain yang memiliki otoritas untuk memberikan penilaian serta konsekuensi atas tindakan tersebut. Menurut Halim dan Kusufi (2022) serta Schillemans dan Bovens (2021), akuntabilitas dalam organisasi modern dapat dikelompokkan menjadi beberapa jenis, antara lain akuntabilitas manajerial/proses, akuntabilitas legal/hukum, akuntabilitas finansial,

Kerangka Konseptual

Secara skematis, alur pemikiran yang menunjukkan pengaruh konseptual antara variabel independen dan variabel dependen dalam penelitian ini dapat digambarkan sebagai berikut:



Gambar 1. Kerangka Konseptual

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif dengan tujuan untuk menguji pengaruh antar variabel melalui pengukuran data numerik secara sistematis (Creswell, 2020). Rancangan penelitian ini memungkinkan peneliti untuk melakukan pengujian hipotesis secara objektif dengan pendekatan matematis melalui analisis statistik inferensial. Teknik analisis data yang digunakan adalah Analisis Regresi Linear Sederhana. Penelitian ini dilaksanakan di BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo, yang berlokasi di Tanjung Selor. Penelitian ini dilaksanakan pada periode Agustus 2026. Sampel yang digunakan pada penelitian ini yaitu 80 responden, yang dimana ditentukan menggunakan rumus slovin. Instrumen utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah kuesioner tertutup yang disusun dalam bentuk skala Likert. Pengolahan dan analisis data dilakukan dengan bantuan perangkat lunak IBM SPSS (*Statistical Package for the Social Sciences*) versi terbaru agar proses perhitungan statistik dapat dilakukan secara lebih akurat serta mempermudah interpretasi hasil analisis secara sistematis dan objektif.

HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Analisis Regresi Linear Berganda dan Pengujian Hipotesis Parsial (Uji t)

Setelah seluruh instrumen penelitian dinyatakan lolos dari uji validitas dan reliabilitas, analisis melangkah pada inti pengujian model kuantitatif, yaitu Analisis Regresi Linear Berganda. Melalui tabel *Coefficients* yang dihasilkan oleh program SPSS, kita dapat mengupas secara tajam seberapa besar kekuatan pengaruh, arah hubungan, serta tingkat signifikansi parsial dari masing-masing variabel

independen yaitu Kualitas Pelaporan Keuangan (X1) dan Pengelolaan Keuangan (X2) terhadap variabel dependen, yaitu Akuntabilitas Publik (Y) pada BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan.

Tabel 2. Hasil Coefficients

Coefficients ^a					
Model		Unstandardized Coefficients		Standardized Coefficients	
		B	Std. Error	Beta	
1	(Constant)	3.176	3.788		.839
	Kualitas Pelaporan Keuangan	.658	.156	.383	4.216
	Pengelolaan Keuangan	.936	.174	.489	5.384

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

Berdasarkan hasil output statistik yang disajikan pada tabel *Coefficients*, model persamaan regresi linear berganda dalam penelitian ini dapat dirumuskan secara matematis sebagai berikut:

$$Y = 3,176 + 0,658.X1 + 0,936.X2$$

Nilai B (Unstandardized Coefficient): Angka 3,176 merupakan nilai intersep atau kondisi dasar (*baseline*). Secara teoretis, angka ini bermakna bahwa apabila variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (X1) dan Pengelolaan Keuangan (X2) bernilai konstan atau sama dengan nol, maka nilai Akuntabilitas Publik (Y) pada rumah sakit sudah memiliki modal dasar sebesar 3,176 satuan skor. Nilai t-hitung (0,839) dan Sig. (0,404): Menariknya, jika diperhatikan angka statistiknya, nilai t_{hitung} konstanta ini hanya sebesar 0,839 dengan tingkat signifikansi 0,404 yang berada jauh di atas 0,05. Hal ini mengindikasikan bahwa nilai konstanta murni secara statistik tidak berpengaruh signifikan. Artinya, rumah sakit tidak bisa mengandalkan status alamnya saja untuk menjadi akuntabel kepada publik; peningkatan akuntabilitas mutlak membutuhkan intervensi aktif dari kualitas pelaporan dan pengelolaan keuangan harian.

Variabel Kualitas Pelaporan Keuangan (X1), Nilai B (Koefisien Regresi) = 0,658: Angka ini bernilai positif dan menunjukkan arah hubungan yang searah. Maknanya, setiap terjadi peningkatan kualitas pelaporan keuangan sebesar satu satuan skor (dengan asumsi variabel lain tetap), maka akan mendorong kenaikan Akuntabilitas Publik (Y) sebesar 0,658 satuan skor. Nilai t-hitung = 4,216: Untuk menguji signifikansinya, kita membandingkan nilai ini dengan nilai t_{tabel} . Dengan jumlah sampel $n = 80$ dan variabel $k = 2$, diperoleh nilai t_{tabel} pada $\alpha = 5\%$ sebesar 1,991. Karena nilai $t_{hitung} > t_{tabel}$ ($4,216 > 1,991$), maka pengaruhnya terbukti sangat kuat. Nilai Sig. = 0,000: Nilai probabilitas ini berada jauh di bawah ambang batas toleransi 0,05. Dua kombinasi angka ini (t yang besar dan p yang kecil) secara mutlak menerima Hipotesis Pertama (H_1). Ini membuktikan secara empiris bahwa semakin transparan, akurat (lewat SIMRS), dan tepat waktu laporan keuangan disajikan, maka akuntabilitas publik rumah sakit akan meningkat secara signifikan.

Variabel Pengelolaan Keuangan (X2), Nilai B (Koefisien Regresi) = 0,936: Angka ini memiliki nilai koefisien yang sangat besar dan bernilai positif. Artinya, setiap peningkatan efektivitas pengelolaan keuangan (seperti pemanfaatan fleksibilitas BLUD dan penguatan pengendalian intern) sebesar satu satuan skor, maka akan melonjakkan Akuntabilitas Publik (Y) sebesar 0,936 satuan skor. Nilai t-hitung = 5,384: Angka ini menunjukkan nilai kelayakan statistik yang sangat masif.

Saat disandingkan dengan t_{tabel} , nilai t_{hitung} jauh melampaui batas kritis ($5,384 > 1,991$). Nilai Sig. = 0,000: Tingkat signifikansi yang menyentuh angka 0,000 ($p < 0,05$) memastikan bahwa Hipotesis Kedua (H_2) diterima dengan sangat meyakinkan. Angka ini menegaskan bahwa fleksibilitas tata kelola anggaran harian BLUD yang dijalankan secara tertib dan melibatkan partisipasi divisi klinis merupakan pendorong utama tegaknya akuntabilitas publik rumah sakit.

Koefisien Determinasi (R^2)

Tabel ini menyediakan informasi vital mengenai nilai Koefisien Korelasi (R) untuk mengukur kekuatan hubungan, serta Koefisien Determinasi (R Square) guna mengetahui seberapa besar persentase kontribusi yang diberikan oleh Kualitas Pelaporan Keuangan (X_1) dan Pengelolaan Keuangan (X_2) dalam menjelaskan naik-turunnya nilai Akuntabilitas Publik (Y) pada BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan. Berikut adalah hasil output *Model Summary* pada tabel di bawah ini:

Tabel 3. Hasil Uji Koefisien Determinasi

Model Summary

Model	R	R Square	Adjusted R Square	Std. Error of the Estimate
1	.605 ^a	.366	.349	3.07043

a. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan, Kualitas Pelaporan Keuangan

Berdasarkan tabel diatas menunjukkan nilai R Square yaitu 0,366 merupakan representasi dari kemampuan prediktif model. Jika diubah ke dalam bentuk persentase, nilai ini setara dengan 36,6%. Nilai ini membuktikan bahwa Kualitas Pelaporan Keuangan (X_1) dan Pengelolaan Keuangan (X_2) secara simultan (bersama-sama) mampu menjelaskan varians atau memengaruhi nilai Akuntabilitas Publik (Y) di RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo sebesar 36,6%. Di sisi lain, terdapat sisa persentase sebesar 63,4% ($100\% - 36,6\%$) yang dipengaruhi oleh variabel atau faktor-faktor lain di luar model linear berganda ini yang tidak ikut diteliti. Angka 0,349 atau 34,9% merupakan nilai koefisien determinasi yang telah disesuaikan atau dikoreksi terhadap jumlah variabel dan ukuran sampel ($n = 80$). Nilai *Adjusted R Square* ini sering kali dianggap lebih stabil dan objektif dalam analisis regresi linear berganda untuk menghindari bias kenaikan nilai R Square palsu akibat penambahan variabel. Angka 34,9% yang searah dan mendekati nilai R Square murni (36,6%) menegaskan bahwa model regresi yang digunakan dalam penelitian ini sudah cukup fit, konsisten, dan terbebas dari gejala *overfitting*.

Uji Simultan (Uji F)

Pengujian kelayakan model (*goodness of fit*) melalui Uji Signifikansi Simultan (Uji F). Pengujian ini diwakili oleh tabel ANOVA (*Analysis of Variance*) yang berfungsi untuk membuktikan apakah Kualitas Pelaporan Keuangan (X_1) dan Pengelolaan Keuangan (X_2) secara bersama-sama (simultan) memiliki pengaruh yang signifikan terhadap Akuntabilitas Publik (Y) pada BLUD RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan. Uji F ini menjadi penentu utama apakah model regresi linear berganda yang telah disusun layak digunakan untuk menarik kesimpulan ilmiah atau tidak. Kriteria pengambilan keputusannya didasarkan pada perbandingan antara nilai F_{hitung} dengan F_{tabel} , serta melihat nilai probabilitas signifikansinya dengan ambang batas $\alpha=5\%$ (0,05). Berikut adalah hasil output

pengujian ANOVA yang disajikan pada tabel di bawah ini:

Tabel 4. Hasil Uji F

ANOVA^a

Model		Sum of Squares	df	Mean Square	F	Sig.
1	Regression	418.466	2	209.233	22.194	.000 ^b
	Residual	725.921	77	9.428		
	Total	1144.388	79			

a. Dependent Variable: Akuntabilitas Publik

b. Predictors: (Constant), Pengelolaan Keuangan, Kualitas Pelaporan Keuangan

Tabel diatas menunjukkan Nilai F-Hitung yaitu 22,194, Angka ini merupakan nilai statistik F-hitung dari model regresi. Untuk menguji signifikansinya, angka ini harus dibandingkan dengan Ftabel. Menggunakan tingkat signifikansi 5% dengan nilai $df_1 = 2$ dan $df_2 = 77$, diperoleh nilai Ftabel sebesar 3,116. Melalui perbandingan tersebut, terlihat sangat jelas bahwa nilai Fhitung jauh lebih besar daripada nilai Ftabel ($22,194 > 3,116$). Hal ini membuktikan bahwa model regresi yang diajukan memiliki tingkat kecocokan data (*fit*) yang sangat tinggi. Keputusan Hipotesis: Nilai probabilitas pada kolom terakhir menunjukkan angka 0,000, yang berarti nilai p-value berada jauh di bawah ambang batas toleransi kesalahan yang ditetapkan ($0,000 < 0,05$). Berdasarkan hasil perbandingan F-hitung yang masif dan tingkat signifikansi yang mutlak tersebut, maka keputusan statistik yang diambil adalah Menerima Hipotesis Ketiga (H3).

Diterimanya H3 memberikan bukti empiris yang tidak terbantahkan bahwa Kualitas Pelaporan Keuangan (X1) dan Pengelolaan Keuangan (X2) secara simultan (bersama-sama) berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik (Y) pada BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan. Secara substantif, temuan ini menegaskan bahwa penegakan akuntabilitas publik di rumah sakit tidak dapat berdiri sendiri. Transparansi serta keandalan dokumen laporan di hilir (X₁) harus berjalan beriringan dengan kelincahan tata kelola anggaran harian dan ketatnya pengawasan internal BLUD di hulu (X₂). Ketika kedua pilar keuangan ini diperkuat secara bersamaan, maka kualitas layanan kesehatan, kepuasan masyarakat Bulungan, serta kepatuhan terhadap regulasi ganda (*dual compliance*) dipastikan akan meningkat secara nyata dan optimal.

Pembahasan**1. Pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik**

Berdasarkan hasil pengujian parsial (Uji t), variabel Kualitas Pelaporan Keuangan terbukti memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik pada BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan. Koefisien regresi yang bernilai positif menandakan bahwa setiap peningkatan kualitas penyajian laporan keuangan akan diikuti oleh peningkatan pertanggungjawaban publik rumah sakit secara linier. Secara kontekstual di lapangan, temuan ini menafsirkan bahwa akuntabilitas publik sebuah rumah sakit daerah sangat bergantung pada keandalan informasi finansial yang disajikannya. Ketika RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo mampu menyajikan laporan keuangan yang akurat melalui integrasi Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) yang minim kesalahan manual, serta melakukan rekonsiliasi kas dan piutang klaim

(BPJS) secara andal, maka distrust atau keraguan publik dapat diredam. Ketepatan waktu penyampaian laporan ke Pemkab Bulungan dan publikasi ringkasan secara digital terbukti menjadi instrumen hulu yang krusial untuk membangun reputasi dan akuntabilitas rumah sakit di mata eksternal (BPK dan masyarakat).

Pentingnya kualitas pelaporan keuangan ini tecermin nyata pada dinamika operasional harian rumah sakit daerah. Sebagai pusat rujukan utama di Kabupaten Bulungan, rumah sakit ini menghadapi volume transaksi keuangan yang tinggi, khususnya terkait dengan klaim piutang pelayanan pasien BPJS Kesehatan dan pengadaan perbekalan farmasi. Ketersediaan laporan keuangan yang akurat dan tepat waktu melalui Sistem Informasi Manajemen Rumah Sakit (SIMRS) membantu pihak manajemen dalam melakukan percepatan proses verifikasi klaim serta rekonsiliasi kas harian. Ketika pencatatan transaksi medis dan administrasi keuangan di RSUD Bulungan tersaji secara transparan dan bebas dari celah selisih, maka tidak hanya opini laporan keuangan Pemkab Bulungan yang terjaga, melainkan juga tingkat kepercayaan masyarakat Bulungan terhadap integritas tata kelola entitas kesehatan daerah tersebut.

Hasil penelitian ini secara utuh mendukung dan mengintegrasikan prinsip Stewardship Theory (Teori Penatalayanan) dalam ranah akuntansi sektor publik. Dalam teori ini, manajemen rumah sakit (Direktur dan jajaran pengelola keuangan) diposisikan sebagai *steward* (pelayan) yang bertindak penuh integritas demi kepentingan *principal* (pemerintah daerah dan masyarakat Bulungan), bukan demi kepentingan pribadi. Kualitas pelaporan keuangan yang andal dan transparan merupakan wujud pertanggungjawaban moral dan legal dari *steward* untuk melaporkan resources (sumber daya ekonomi) yang telah dipercayakan publik kepada mereka. Ketika laporan keuangan memenuhi karakteristik kualitatif (andal, relevan, dapat dipahami), maka keselarasan tujuan (*goal congruence*) antara pihak rumah sakit selaku pengelola dan masyarakat selaku penerima layanan dapat tercapai secara paripurna.

Temuan empiris penelitian ini berhasil memperkuat riset terdahulu yang dilakukan oleh Kamela, et al. (2024) serta Devi & Basyar (2024) yang menyatakan bahwa transparansi dan keselarasan pelaporan keuangan menentukan keberhasilan tata kelola daerah yang akuntabel. Lebih jauh lagi, hasil penelitian ini berhasil menjawab dan menutup *research gap* dari riset Kamela, et al. (2024). Jika riset terdahulu hanya berfokus pada dampak hilir publikasi digital di website, penelitian ini membuktikan secara empiris bahwa akuntabilitas publik yang optimal baru bisa tegak jika didukung oleh keandalan faktor hulu akuntansi, yakni ketatnya proses validasi rekonsiliasi kas-piutang serta keandalan sistem informasi (SIMRS) yang berjalan di dalam internal RSUD Kabupaten Bulungan.

2. Pengaruh Pengelolaan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik

Hasil pengujian hipotesis secara parsial menunjukkan bahwa variabel Pengelolaan Keuangan memiliki pengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik pada BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan. Penafsiran dari kedominanan variabel ini mengindikasikan bahwa di mata pegawai dan publik, esensi sejati dari status BLUD sebuah rumah sakit terletak pada "bagaimana uang itu dikelola secara nyata setiap hari", bukan sekadar bagaimana ia dilaporkan di atas kertas. Status PPK-BLUD memberikan "hak istimewa" berupa fleksibilitas anggaran di mana RSUD Kabupaten Bulungan dapat

langsung menggunakan pendapatan fungsionalnya untuk operasional darurat.

Ketika fleksibilitas ini dikelola dengan pengendalian internal yang ketat (terutama pada manajemen persediaan obat-obatan dan alkes) serta melibatkan partisipasi kolektif dari divisi klinis (dokter dan perawat) dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), maka pemborosan dana dapat ditekan. Efektivitas tata kelola ini berdampak langsung pada penurunan waktu tunggu pasien dan pemenuhan Standar Pelayanan Minimal (SPM) kesehatan, yang menjadi indikator utama penilaian akuntabilitas publik di mata masyarakat Bulungan.

Dalam perspektif Stewardship Theory, komitmen untuk mengelola keuangan secara efektif, efisien, dan partisipatif menunjukkan bahwa jajaran manajemen RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo bertindak sebagai pelayan yang bertanggung jawab penuh terhadap pencapaian tujuan organisasi kolektif. Teori ini mengasumsikan bahwa steward akan termotivasi untuk melakukan pengendalian intern yang ketat dan menyusun RBA yang realistis karena mereka menempatkan kepuasan publik (pasien) di atas segalanya. Fleksibilitas keuangan BLUD tidak disalahgunakan untuk kepentingan kelompok, melainkan dikonversi secara maksimal menjadi utilitas pelayanan publik yang responsif terhadap keluhan masyarakat.

Apabila ditinjau dari kondisi riil di RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan, dominannya pengaruh pengelolaan keuangan ini sangat erat kaitannya dengan penerapan status PPK-BLUD yang memberikan fleksibilitas operasional. Mengingat kondisi geografis Kabupaten Bulungan yang membutuhkan kecepatan pasokan obat-obatan dan alat kesehatan, mekanisme fleksibilitas anggaran BLUD memungkinkan manajemen rumah sakit untuk langsung menggunakan pendapatan fungsionalnya tanpa harus melalui rantai birokrasi anggaran daerah yang panjang. Fleksibilitas ini, saat dipadukan dengan pengawasan internal yang ketat serta keterlibatan aktif para dokter dan perawat dalam penyusunan Rencana Bisnis dan Anggaran (RBA), berdampak langsung pada pemangkasan waktu tunggu pelayanan pasien di poliklinik maupun instalasi gawat darurat (IGD). Ketersediaan obat yang selalu terjamin dan responsivitas layanan klinis inilah yang dirasakan langsung oleh masyarakat Bulungan sebagai wujud nyata dari akuntabilitas publik instansi.

Secara empiris, penelitian ini mendukung temuan Deka Yuhendrizar, Erliany Syaodih, & Rinawati (2025) serta M. Ramadhan (2025) yang menyatakan bahwa efektivitas dan transparansi pengelolaan keuangan daerah berpengaruh positif secara signifikan terhadap kinerja anggaran dan operasional instansi pemerintah. Penelitian ini juga berhasil memecahkan dua *research gap* penting sekaligus:

1. Mengatasi Gap Kontekstual Firmansyah (2024): Jika riset Firmansyah masih bersifat umum (*scoping review*) pada entitas BLU tingkat pusat, penelitian ini berhasil memberikan pembuktian spesifik pada tingkat daerah (BLUD RSUD) yang menghadapi tekanan kepatuhan ganda (*dual compliance*) antara aturan daerah (Permendagri No. 79 Tahun 2018) dan standar mutu klinis nasional (Permenkes/Akreditasi).
2. Mengatasi Gap Eksplanatori Zulfahmi, et al. (2025): Riset Zulfahmi terdahulu dikritik karena hanya fokus pada profitabilitas internal rumah sakit (seperti ROA). Penelitian ini melangkah lebih jauh dengan membuktikan secara nyata bahwa pengelolaan keuangan BLUD yang baik tidak berhenti pada angka

keuntungan internal, melainkan ditransmisikan secara nyata menjadi peningkatan akuntabilitas publik eksternal (mutu layanan, responsivitas keluhan, dan kepuasan pasien).

3. Pengaruh Simultan Kualitas Pelaporan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik

Berdasarkan hasil pengujian simultan melalui Uji F (ANOVA) bahwa semua variabel memberikan pengaruh, ini menafsirkan bahwa Kualitas Pelaporan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan secara bersama-sama (simultan) memegang kontribusi yang bagus dalam menentukan tegaknya Akuntabilitas Publik (Y) pada BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan. Secara substantif, hasil uji simultan ini menegaskan bahwa penegakan akuntabilitas publik pada instansi kesehatan berstatus BLUD tidak bisa dilakukan secara parsial atau setengah-setengah. Rumah sakit tidak bisa hanya fokus pada pembenahan sistem akuntansi di hilir agar laporan keuangannya mendapatkan opini WTP dari BPK, namun melupakan kelincahan pengadaan obat di hulu. Sebaliknya, fleksibilitas anggaran yang lincah di hulu jika tidak diimbangi oleh sistem pencatatan laporan yang andal, justru akan memicu risiko temuan salah saji yang merusak nama baik instansi. Kedua pilar keuangan ini harus bergerak secara simultan dan beriringan demi mewujudkan pertanggungjawaban pelayanan yang paripurna kepada publik.

Dalam konteks penyelenggaraan organisasi di RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan, pengaruh simultan kedua variabel ini menggambarkan keharusan menjaga keseimbangan antara tuntutan kepatuhan aturan daerah (Permendagri tentang BLUD) dan standar mutu pelayanan kesehatan nasional (Permenkes/Akreditasi Rumah Sakit). Kelincahan pengelolaan dana harian di hulu tanpa didukung ketertiban sistem pencatatan laporan di hilir akan berisiko memicu temuan audit BPK yang merusak citra RSUD Bulungan. Sebaliknya, pelaporan keuangan yang sempurna secara administratif tidak akan bermakna bagi masyarakat jika kelola anggaran di lapangan lambat dan memicu kelangkaan obat. Oleh karena itu, keselarasan antara kualitas pelaporan dan efektivitas pengelolaan keuangan menjadi kunci utama RSUD Dr. H. Soemarno Sosroatmodjo dalam mewujudkan akuntabilitas publik yang utuh dan berkelanjutan di Kabupaten Bulungan.

Temuan simultan ini memperkuat teori tata kelola sektor publik yang juga ditemukan dalam riset Ramadhan (2025), yang menegaskan bahwa transparansi pelaporan dan akuntabilitas pengelolaan anggaran secara bersama-sama menentukan efektivitas kinerja instansi pemerintah. Penelitian ini juga berhasil mengatasi *gap* metodologis dari riset Ramadhan (2025). Jika riset terdahulu hanya mengandalkan kuesioner persepsi subjektif semata, penelitian di RSUD Kabupaten Bulungan ini berhasil mengintegrasikan indikator-indikator riil kedinasan, seperti kepatuhan regulasi ganda (Permendagri & Permenkes) serta hasil audit riil instansi, sehingga model simultan yang dihasilkan jauh lebih objektif dan kokoh secara akademis.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian pengaruh Kualitas Pelaporan Keuangan dan

Pengelolaan Keuangan terhadap Akuntabilitas Publik pada BLUD RSUD dr. H. Soemarno Sosroatmodjo Kabupaten Bulungan dengan jumlah 80 responden, maka dapat ditarik beberapa kesimpulan yaitu Kualitas Pelaporan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik (Y) secara parsial. Pengelolaan Keuangan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik secara parsial, serta bertindak sebagai variabel yang paling dominan. Kualitas Pelaporan Keuangan dan Pengelolaan Keuangan secara simultan berpengaruh positif dan signifikan terhadap Akuntabilitas Publik.

DAFTAR PUSTAKA

- Bovens, M. 2021. *Public Accountability*. Oxford: Oxford University Press.
- Diana, P., Lestari, B. A. H., & Nurabiah, N. (2023). Peran Sistem Keuangan Desa Dalam Meningkatkan Kualitas Akuntabilitas Keuangan Desa di Desa Penujak. *Jurnal Aplikasi Akuntansi*, 7(2), 298–314.
- Florini, A. 2020. *The Right to Know: Transparency for an Open World*. New York: Columbia University Press.
- Halim, A., & Kusufi, M. S. (2022). *Akuntansi Sektor Publik: Teori, Konsep, dan Aplikasi* (Edisi 4). Jakarta: Salemba Empat.
- Hood, C. (1991). A public management for all seasons?. *Public Administration*, 69(1), 3–19.
- International Accounting Standards Board (IASB). 2020. *Conceptual Framework for Financial Reporting*. London: IFRS Foundation.
- Jensen, M. C., & Meckling, W. H. (1976). Theory of the firm: Managerial behavior, agency costs and ownership structure. *Journal of Financial Economics*, 3(4), 305–360.
- Mardiasmo. (2021). *Akuntansi Sektor Publik* (Edisi Terbaru). Yogyakarta: Andi Offset.
- Novyandina, J., Noerjoedianto, D., & Sari, R. E. (2025). Analisis Pengelolaan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Di Puskesmas Muara Bungo I Kabupaten Bungo. *Jurnal Manajemen Kesehatan Indonesia*, 13(1), 99-109.
- Osborne, D., & Gaebler, T. 1992. *Reinventing Government*. Reading, MA: Addison-Wesley.
- Ramadhani, A. T., & Sulistyowati, E. (2022). Analisis Penerapan Pernyataan Standar Akuntansi Pemerintah ahan pada Laporan Keuangan Puskesmas Badan Layanan Umum Daerah. *Indonesian Journal of Research in Economy*, 1(2), 116-124
- Rahmiati, K., & Baihaqi, B. (2025). Pengaruh Kompetensi Sumber Daya Manusia, Komitmen Organisasi Dan Sistem Pengendalian Internal Terhadap Kualitas Laporan Keuangan Pemerintah Daerah. *Jurnal Ilmiah Manajemen, Ekonomi, & Akuntansi (MEA)*, 9(1), 3081-3101.
- Rianti, A. (2021). Model Pengawasan Keuangan pada Badan Layanan Umum Daerah (BLUD) di SMK Negeri 1 Jenengan Ponorogo. *Jurnal Muslim Heritage*, 6(2), 239-256.

- Schillemans, T., & Bovens, M. (2021). Governance structures and public accountability: A comparative analysis of horizontal and vertical mechanisms. *Public Administration Review*, 81(4), 612-626.
- Syahputera, R., & Padriansyah, P. (2023). Analisis Komparatif Implementasi Standar Akuntansi Pemerintah Terhadap Penyusunan Pelaporan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah Pada Rumah Sakit Umum Daerah Di Kabupaten Musi Banyuasin. *Bilancia: Jurnal Ilmiah Akuntansi*, 7(3), 712-718.
- Zulfahmi, Z., Yuliaty, I., & Nurhaida, N. (2025). Pengaruh Penerapan Status BLUD Terhadap Kinerja Keuangan dan Akuntansi BLUD RSUD dr. Zainoel Abidin. *Journal of Medical Science*, 6(1), 35-41.